

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa “Paradigma pembangunan nasional sudah meniti suatu perubahan yang relevan, dari pembangunan yang hanya bertumpu pada Negara menjadi pada masyarakat atau lebih dikenal dengan pembangunan masyarakat.”(Presiden RI, 2004)

Infrastruktur merupakan suatu hal yang paling penting dalam menjalankan perekonomian negara, yang sering dilakukan dalam pembangunan kota dan pembangunan kawasan ekonomi. Selain memfasilitasi, infrastruktur juga akan membantu memperlancar aktivitas pada masyarakat dan dengan adanya infrastruktur bisa terselenggaranya sistem-sistem yang akan di kerjakan seperti transportasi dan lain sebagainya secara efisien dan efektif.

Tidak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur jalan merupakan yang sering digunakan, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 yaitu di mana jalan tersebut merupakan infrastruktur transportasi yang memegang peranan penting dalam perekonomian yang merupakan sumber kehidupan masyarakat dan negara, juga digunakan untuk kesejahteraan rakyat, sebagai prasarana distribusi barang dan sebagai jaringan gabungan sistem jalan yang menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Pertama kali jalan dibangun di Indonesia pada tahun 1089. Kurang lebih panjang dari jalan raya mencapai sekitar

1.000 km ini melewati berbagai kota. Termasuk di Pulau Jawa, yaitu pusat-pusat pemerintahan maupun kerajaan pada masa itu, yaitu dari Anyer Provinsi Banten samapai Panarukan di Jawa Timur. Seiring dengan meluasnya wilayah, jadi semakin banyaknya pembangunan jalan yang dapat melintasi perkotaan maupun pedesaan.

Banyaknya kendaraan yang ada di Indonesia baik itu dari roda dua atau roda empat mesti adanya bantuan dari fasilitas jalan yang apik dan terjamin. Kehadiran jalan umum untuk menyambung antara wilayah amat penting demi lajur penyaluran barang dan jasa melalui kendaraan darat. Masalah ini harus memperoleh kepedulian pihak-pihak untuk suatu yang diperlukan yang bisa diucapkan dasar. Kegiatan masyarakat bersamaan dengan banyaknya penduduk yang terus meningkat disebuah wilayah adalah salah satu faktor pendukung keperluan ekspedisi yang mementingkan perlunya tingkat efisiensi, aman, juga keamanan dalam perjalanan. Menambahnya aktivitas pada kehidupan masyarakat, keberadaan jalan juga akan meningkat, sekarang ini jalan tidak saja untuk memperlancar mobilitas sosial, bahan dan layanan tetapi bersangkutan pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang ditingkatkan cara pembangunan wilayah supaya diperolehnya kesetimbangan dana untuk pembangunan serupa lintas daerah.

Oleh karenanya pemerintah berupaya untuk selalu membangun dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana demi kepentingan dan mensejahterakan masyarakat melalui infrastruktur seperti salah satunya yaitu jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kualitas kehidupan masyarakat. Biasanya pembangunan infrastruktur tidak bertahan dengan kurun waktu yang lama

dikarenakan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada hasil aktivitas fisik berupa jalan raya diantaranya, sedang minimnya optimalisasi yang memadai dan mendukung infrastruktur baik dalam sistem maupun kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kurangnya perhatian dan tanggung jawab dari masyarakat dalam upaya untuk membantu memelihara fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pemerintah sehingga menyebabkan adanya kerusakan. Padahal itu semua untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas masyarakat itu sendiri dalam hal kegiatan sehari-hari jadi jika tidak adanya kepedulian dan perhatian dari masyarakat akan merugikan dan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi bahkan pembangunan pemerintahan.

Menurut Taliziduhu (2009) dalam (Hidayat et al., 2018) menjelaskan bahwa “Partisipasi masyarakat dalam pembangunan intensif yang diprakarsai oleh pemerintah dapat dan harus dicapai melalui pembangunan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi pemerintah merupakan suatu proses timbal balik pengiriman informasi dan pesan antara pemerintah dan pemerintah, satu pihak menggunakan “*frame of reference*” pihak lain, dalam posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap pihak lain tersebut terbentuk, diubah atau dipertahankan berdasarkan pemahaman bersama. dan rasa saling percaya antara kedua pihak”. (Hidayat et al., 2018:188)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “(1) peran serta masyarakat untuk memberikan pemikiran, aspirasi, serta kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; (2) masyarakat

merupakan perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat; (3) organisasi kemasyarakatan yaitu yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undang yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.(Presiden RI, 2017) Selain itu juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat harus dilaksanakan berbagai upaya eskalasi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor : 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan Jalan dan Penilikan disebutkan Pasal 1 bahwa “Pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin berkala jalan, dan rehabilitasi jalan.” Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 25 tentang penyelenggaraan jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan nasional menjelaskan bahwa “masyarakat bisa bermain juga dalam pemeliharaan jalan, tugas masyarakat pada penerapan pemeliharaan jalan begitu juga diterangkan pada ayat (1) yaitu kapasitas orang atau lembaga selama tidak merugikan kebutuhan umum.”(Peraturan Menteri PU, 2011)

Sesuai dengan upaya pemeliharaan jalan rusak, pemerintah kabupaten Bandung utamanya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sangat bertindak terhadap pemeliharaan dan rekonstruksi jalan apalagi wilayah dianggap amat berpengaruh dalam mengembangkan pembangunan daerah. Selain itu peran dari masyarakat juga dibutuhkan dalam menjalankan program pembangunan infrastruktur karena ini adalah salah satu syarat untuk kesuksesan proses pembangunan masyarakat.

Salah satu dukungan dari masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah serta bisa mensukseskan program yang sudah direncanakan, begitu juga dengan pemerintah harus bisa membimbing masyarakat dalam hal menjaga ataupun memelihara program tersebut. Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan di jalan Mantap wilayah kabupaten Bandung dimana sudah terealisasi 75 % dan sisanya 25 % pemeliharaan, dilihat dari data mengatakan bahwa kebanyakan masih rendahnya masyarakat dalam meningkatkan mutu bangunan dalam pemeliharaan infrastruktur.

Pembangunan jalan Mantap itu sendiri sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu serta mendapat pengembangan dari tahun ke tahun tetapi sering mengalami kendala dalam pembangunan tersebut. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) berusaha mengaplikasikan 5 T, berupa tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat mutu juga tepat manfaat untuk mengukuhkan pembangunan di wilayah tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri sudah menargetkan pada 90% jalan bisa dalam kondisi mantap pada tahun 2020. Didukung dengan anggaran perbaikan mencapai Rp 200 milyar. Menurut Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum mengatakan bahwa saat ini dari 1.160 KM jalan di kabupaten Bandung sudah dalam keadaan baik sekitar 77,06%, dan masih ada beberapa kerusakan jalan yaitu 11,17% rusak ringan dan 11,77% rusak berat.

Untuk itu dalam hal ini peran masyarakat sangat berpengaruh dalam menjaga dan memelihara pembangunan infrastruktur dalam implementasi program/proyek yang sudah dilaksanakan seperti jalan. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi

masyarakat pemerintah akan merasa terbantu dan terarah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti akan mengambil judul penelitian **“ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JALAN MANTAP DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG”**.

### **B. Fokus Masalah**

Berlandaskan latar belakang sebelumnya, terdapat persoalan yang teridentifikasi, diantaranya:

Kurangnya kepekaan masyarakat dalam upaya pemeliharaan secara swadaya dalam bentuk hasil aktivitas fisik berupa jalan Mantap di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, bahwa permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana masyarakat ikut andil dalam ide perencanaan pembangunan/pemeliharaan infrastruktur di desa sekarwangi?
2. Bagaimana masyarakat ikut terjun langsung dalam proses pemeliharaan infrastruktur di desa sekarwangi?
3. Bagaimana peran masyarakat dalam pengevaluasian dan pemeliharaan pembangunan infrastruktur di desa Sekarwangi?
4. bagaimana masyarakat ikut membantu berkontribusi barang dalam pemeliharaan infrastruktur di desa sekarwangi?

5. Bagaimana masyarakat ikut membantu dalam bentuk baik berupa sumbangan/dana?

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa maksud dan tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengenal seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan dan bagaimana kerjasama antara pemerintah dan masyarakat tentang program pembangunan infrastruktur jalan Mantap di kecamatan soreang kabupaten Bandung, selain itu juga untuk mengetahui faktor apa yang membuat kendala Pemerintah Kabupaten Bandung dalam rangka terealisasinya pemeliharaan jalan Mantap.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan yang diuraikan diatas, jadi penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tumpuan untuk analisis dan teori, sehingga keberhasilan penelitian kedepannya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperbanyak pemahaman bagi peneliti juga menjadi petunjuk bagi mahasiswa Administrasi Publik agar langsung

mempersiapkan diri ke lingkungan masyarakat. Studi ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Bidang Administrasi Publik.

b. Bagi Masyarakat Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

Untuk acuan untuk meningkatkan kepedulian serta kerjasama dalam membangun dan menjaga infrastruktur yang sudah ada.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bnadung

Untuk menambah koleksi perpustakaan dan bahan bacaan bagi mahasiswa program Studi Administrasi Publik pada khususnya dan mahasiswa UIN Bandung pada umumnya.

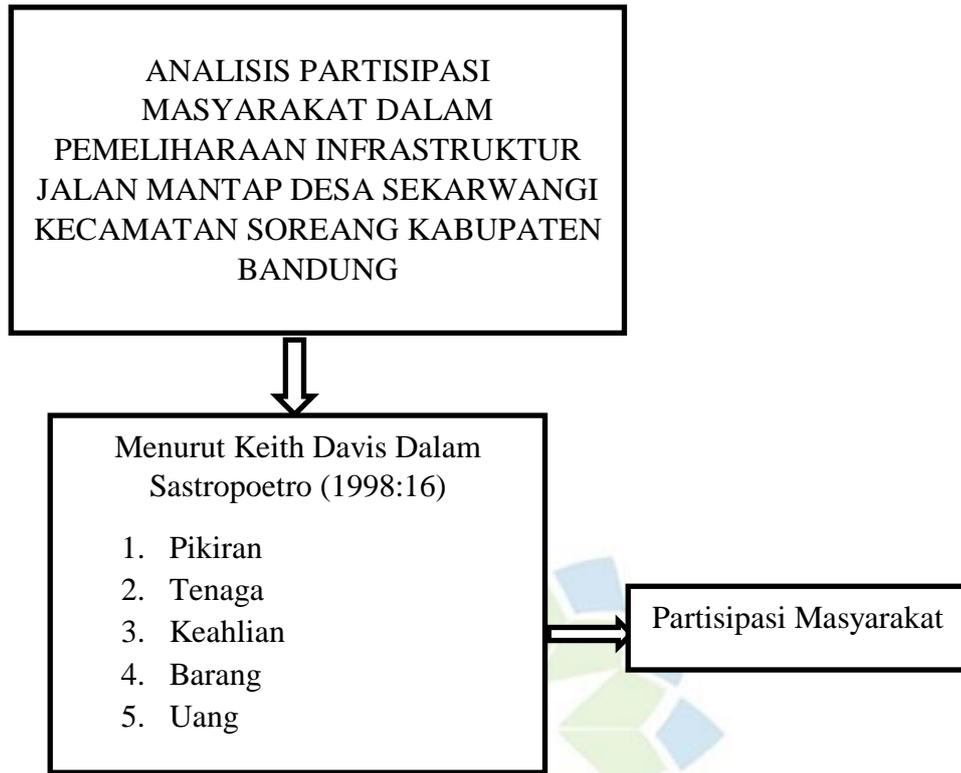
## **F. Kerangka Pemikiran**

Partisipasi Masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemahaman masalah dan potensi yang ada pada masyarakat, membuat keputusan tentang alternatif pemecahan masalah, menerapkan pemecahan masalah, dan membuat pengaturan umum dalam proses mengevaluasi apa yang terjadi termasuk dalam prosesnya pemeliharaan guna menjaga kestabilan hasil pembangunan infrastruktur yang sudah ada.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil teori kerangka berfikir dengan menggunakan partisipasi masyarakat menurut Keith Davis dalam (Sastropetro, 1998:16) sebagai berikut:

1. Pikiran, yaitu partisipasi yang memberikan ide atau gagasan dalam setiap aktivitas pembangunan. Keadaan ini umumnya dilaksanakan pada saat musyawarah masyarakat atau aktivitas rapat program pembangunan. Maksud dengan adanya partisipasi tersebut supaya dapat menyempurnakan perencanaan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, sehingga perolehan aktivitas pembangunan tersebut seimbang dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tenaga, yaitu umumnya bentuk partisipasi ini dilakukan pada saat pelaksanaan pembangunan. Masyarakat bisa melakukan secara gotong royong, hal ini lain daripada untuk mempercepat penolakan, dan juga bisa mempererat ikatan antar warga.
3. Keahlian, yaitu keahlian dalam perencanaan, maupun dalam ilmu pertukangan. Pembangunan program sehari-hari, khususnya pembangunan infrastruktur, tentunya membutuhkan seseorang yang ahli berkedudukan di bidang pembangunan. Pasalnya, belum semuanya memiliki keahlian tentang pertukangan, sehingga dalam pengembangannya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, itu membutuhkan orang-orang terampil yang dapat membuat proses ini sukses.
4. Barang, merupakan keadaan yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan atau urusan yang dapat mendukung aktivitas tersebut. Hal ini dapat dicontohkan seperti, partisipasi masyarakat dengan menyediakan material (batu, pasir, semen) yang dapat mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur.
5. Uang, umumnya uang diterima sebagai alat pembayaran untuk membeli layanan yang baik. Dalam melaksanakan program pembangunan, uang dapat digunakan untuk membayar jasa tenaga terampil yang terlibat dalam kegiatan pembanguana, selain itu banyak hal yang dapat dilakukan dengan menggunakan uang. Masyarakat dapat menggunakan uangnya untuk membeli bahan bangunan (batu, pasir, semen), menyiapkan konsumsi bagi pekerja, dan bisa membantu mempercepat kegiatan pembangunan. Bersarkan bentuk partisipasi yang sudah diterangkan, mereka bisa memilih bentuk partisipasi yang sepadan dengan minat dan kemampuan mereka.



**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**